

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PEMBINAAN PARTAI POLITIK
(Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di
Kabupaten Asahan)**

Skripsi

Oleh:

JONATHAN TOGATOROP

188520182



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PEMBINAAN PARTAI POLITIK
(Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh :

JONATHAN TOGATOROP

188520182

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan
Partai Politik Indonesia (Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI) di Kabupaten Asahan)


Nama : Jonathan Togatorop

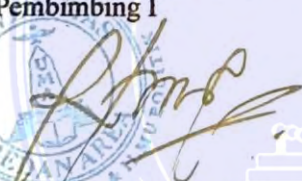
NPM : 188520182


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Dr. Beby Masitho Batubara, S.sos, M.AP
Pembimbing II


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan Fakultas Isipol


Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 20 September 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jonatan Togatorop
NPM : 188520182
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik (Studi pada: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Asahan)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 September 2023

Yang menyatakan



Jonatan Togatorop

188520182

ABSTRAK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran fasilitator bagi kelembagaan masih kurangnya peranan Kesbangpol dalam pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kesbangpol Asahan dan faktor penghambat peran Kesbangpol dalam pembinaan Parpol. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Horopoetrimenunjukkan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan partai politik (Studi pada: Partai PKPI) dapat dibuktikan sebagai berikut: Peran sebagai suatu kebijakan sudah baik terutama dalam partai PKPI salah satunya kebijakan mengenai pendidikan politik, Kesbangpol dalam suatu kebijakan sudah dikatakan baik dengan adanya kebijakan mengenai pendidikan politik yang sudah dilaksanakan oleh setiap Parpol terutama pada Parpol PKPI. Peran sebagai strategi sudah baik karena Kesbangpol sudah melakukan pembinaan seperti pendidikan politik. Peran sebagai alat komunikasi sudah baik sudah terlaksananya tujuan dan informasi yang sudah tersampaikan kepada setiap partai politik. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa cukup baik di mana jika partai politik boleh meminta masukan atau saran dari Kesbangpol. Faktor penghambat yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kesbangpol khususnya pada bidang politik dalam negeri.

Kata Kunci: Partai Politik, Peranan, Pembinaan

ABSTRACT

The National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) had a facilitator role for institutions. This research aims to determine the role and the inhibiting factors of Kesbangpol's in fostering political parties. This research used a qualitative descriptive research with data collection techniques, included interviews, observation and documentation. The results of the research used Horopoetri theory show that the role of National Unity and Politics Agency in fostering political parties can be proven as follows: The role as a policy, as a strategy, as a communication tool, as a dispute resolution tool, the factor was the lack of Human Resources in Kesbangpol.

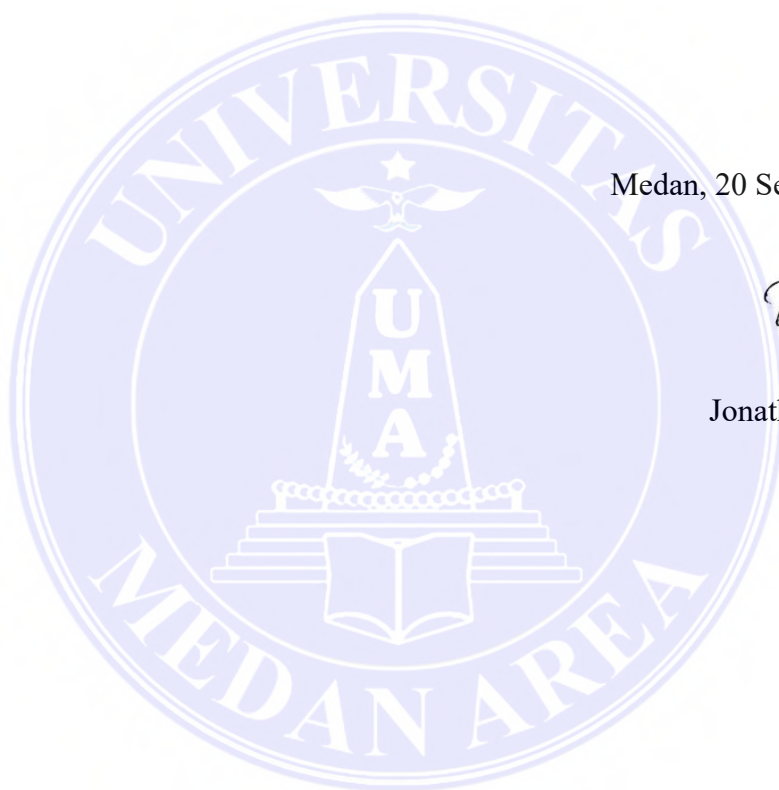
Keywords: Political Party, Role, Development



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jonathan Togatorop, anak dari Bapak Kartiman Togatorop dan Ibu Nurmi Nainggolan, lahir di Sibolga pada tanggal 07 Maret 1999. Penulis merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara.

Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kisaran, pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Medan, 20 September 2023

Jonathan Togatorop

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelaikan skripsi yang berjudul “Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik (Studi Kasus: Partai Kesatuan dan Persatuan (PKPI) di Kabupaten Asahan)” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menuju Sidang Skripsidalam menyelesaikan program studi strata (S-1) di program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial politik Universitas Medan Area

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta saran dari semua pihak yang membantu. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area
2. Teristimewa orang tua yang paling saya cintai, abang dan adik-adik saya tersayang Aldo Surya Togatorop, Hans William Togatorop, Christian David Togatorop
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Polselaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan area
4. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini.
5. Ibu Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, MAP selaku dosen pembimbing 2 yang juga telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini.

6. Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, MAP selaku Sekretaris panitia seminar skripsi.
7. Kepada sahabat-sahabat tercinta saya Mellynita, Marcelania, Febri, Nurma, Febi, Agnes, Ardiansyah dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.

Medan, 20 September 2023

Peneliti



Jonathan Togatorop

NPM. 188520182

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian Peranan	6
2.2 Pembinaan	11
2.2.1 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	13
2.3 Pengertian dan Fungsi Partai Politik	14
2.3.1 Bentuk Partai Politik	19
2.4 Penelitian Terdahulu.....	21
2.5 Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian	26
3.3. Sumber Data	27
3.4. Teknik Pemilihan Informan.....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	31
4.1.2. Visi Dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	34
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36
4.1.4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...	37
4.1.4.1 Kepala Badan.....	37
4.1.4.2. Sekretaris.....	38
4.1.4.3 Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian.....	39

4.1.4.4. Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa.....	40
4.1.4.5 Kepala Sub Bagian Keuangan.....	41
4.1.4.6 Kepala Sub Bagian Program.....	42
4.1.4.7 Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri.....	43
4.1.4.8 Kepala Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.....	44
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik.....	45
4.2.1.1 Peran Sebagai Suatu Kebijakan.....	47
4.2.1.2 Peran Sebagai Strategi.....	49
4.2.1.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi.....	53
4.2.1.4 Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa.....	57
4.3. Faktor Penghambat.....	61
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
PEDOMAN WAWANCARA.....	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Kesbangpol.....	37
Gambar 4.2 Pembinaan Organisasi masyarakat.....	52
Gambar 4.3 Sosialisasi Kesbangol Terhadap Parpol.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Jadwal dan waktu penelitian.....	26
Tabel 4.1.1 Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.....74
2. Dokumentasi dengan Kepala Badan dan Kepala Sub. Bidang hubungan legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan.....74
3. Dokumentasi dengan Bapak Polman Simarmata selaku Ketua PKPI.....75
4. Dokumentasi dengan Bangun M.H Simorangkir,S.P sekretaris PKPI Kabupaten Asahan.....76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran, peran tersebut meliputi fasilitator atau pemberi fasilitas bagi kelembagaan partai-partai politik. Berbagai partai politik yang ada dan terdaftar dalam data, haruslah dibina dengan baik agar partai-partai politik tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor yang ada, dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina partai politik adalah bagaimana partai politik tersebut dapat diarahkan sehingga nilai-nilai atau ideologi yang ada dapat diorganisir dampaknya. Sistem kepartaian ataupun pola-pola yang ada perlu diintegrasikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Pembinaan ini bertujuan agar partai politik tersebut bukan hanyamengejar kekuasaan semata, tetapi diarahkan agar bisa menjadi sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Partai politik seharusnya melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga dapat menjadikan suatu negara yang demokratis, tetapi pada kenyataannya tidak semua fungsi tersebut telah dilaksanakan oleh partai-partai politik yang ada. Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering bahkan keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang disuatu Negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksana dan suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan arah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan. Pendidikan politik yang dilaksanakan

partai politik antara lain ialah berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sadar akan hak dan kewajiban suatu tanggung jawabnya sebagai warga Negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan politik akan menjadi sarana, terpeliharanya stabilitas nasional guna memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan. Partai politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Partai Politik memiliki beberapa tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sering memiliki satu partai yang mengatur negara dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi.

Agar terciptanya stabilitas di bidang sosial politik maka perlu usaha untuk memperkuat persatuan dan kesatuan melalui pembinaan partai politik. Hal ini akan sejalan dengan semakin kuatnya demokrasi yang berdasar pada hukum. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial politik yang melibatkan masyarakat, agar masyarakat lebih kreatif

dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah memiliki keharusan untuk melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap kehidupan sosial politik yang diharapkan akan timbul umpan balik positif dari masyarakat dan terciptanya kondisi sosial politik yang sehat. Salah satu cara pemerintah untuk menciptakan kondisi sosial politik yang sehat dan stabil adalah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai pendukung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu juga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu komponen pendukung bagi Gubernur dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan, dalam pelaksanaannya masih ditemui masalah yang ada di dalam Kesbangpol tersebut yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di Kesbangpol yang kinerja pegawainya kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya, yang membuat peranan Kesbangpol kurang maksimal terhadap partai politik. Berdasarkan latar belakang yang tertuang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan yang berjudul **“Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Partai Politik (Studi pada: Partai Keadilan dan persatuan (PKPI) di Kabupaten Asahan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada beberapa masalah yang dikemukakan pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan ?
2. Faktor penghambatperanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Asahan.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dan kewajiban dalam menyelesaikan studi Strata-1 untuk mencapai gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti sekaligus mampu melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,

sistematis dan metodologi berdasarkan kajian teori teori yang diperoleh selama perkuliahan di Jurusan Administrai Publik.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan bagi instansi terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peranan

Peranan atau yang sering disebut dengan *role* adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang di kelompoknya.

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dibagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya.

Dan fasilitas tersebut biasanya disediakan oleh masyarakat. Lembaga-lembaga

kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang paling banyak menyediakan peluang dalam pelaksanaan peranan. Perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas peranan bertambah. Biasanya dalam suatu negara terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 212-213) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Menurut Miftah Thoha (2012:10) Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Adanya lingkungan yang setiap diperlukan untuk berinteraksi.

Sedangkan menurut Merton (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang

yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001: 242) , peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari masing masing pengertian baik dari peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif merupakan suatu tindakan yang menjadi acuan atau batasan seseorang maupun kelompok organisasi dalam melakukan sesuatu tindakan berdasarkan fungsi dari pembagiannya sesuai ketentuan yg ada dan dapat disepakati dan dilakukan bersama-sama agar mencapai tujuan bersama dengan sebaik baiknya.

Menurut Sihombing (2018:8) ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Sebagai Fasilitator.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mencapai tanpa mengambil posisi tertentu dalam berdiskusi serta dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dan fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasehat atau pendapat. Fasilitator juga bisa menjadi pengarah yang baik untuk permasalahan. Sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan serta memperlancar pelaksanaan dengan suatu usaha tertentu. Fasilitas ialah suatu bantuan yang berupa uang atau benda dalam mempermudah suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Sebagai Pelayanan Masyarakat.

Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.

3. Sebagai Pendamping.

Sebagai pendamping Kesbangpol dapat memberikan kontribusi terhadap partai politik. Acuan kerja yang diterapkannya adalah

Tutwuri Handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Sebagai pendamping tentu memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program-program yang dijelankannya.

4. Sebagai Mitra.

Konsep pemberdayaan yang menempatkan Kesbangpol sebagai subjek, maka Kesbangpol harus dianggap sebagai mitra.

5. Sebagai Penyandang Dana.

Sebagai penyandang dana, Kesbangpol memberikan bantuan baik material maupun non material.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

2.2 Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Menurut beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah upaya dalam memelihara, menjaga serta mengendalikan sesuatu yang direncanakan agar terwujud sesuai dengan tujuan.

Kepala Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan program kerja dan kebijakan sub bidang hubungan legislatif, partai politik dan fasilitas pemilu;

- b. Melaksanakan tugas teknis sub bidang hubungan legislatif, partai politik dan fasilitasi pemilu;
- c. Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan legislatif, partai politik dan fasilitasi pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, partai politik dan fasilitasi pemilu sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.1 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- a. Menugaskan Kasubid menyimpan Konsep Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik.
- b. Memerintahkan Staf untuk Mengumpulkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik dan Mengetik Konsep Draf SK Tim Kegiatan
- c. Mengumpulkan Bahan Pelaksanaan dan Mengetik Konsep Draf SK Tim pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik dan Menyerahkan kepada Kasubid
- d. Mengonsep Bentuk Pembinaan Terhadap Partai Politik dan Menyerahkan Kepada Kasubid

- e. Memeriksa Konsep Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Partai Politik Jika setuju Menyampaikan kepada Kaban Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki
- f. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik dalam bentuk sosialisasi system pemberian dana parpol
- g. Memerintahkan Staf untuk Mendokumentasikan Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik
- h. Membuat Laporan Kegiatan Pembinaan Terhadap Partai Politik Membuat Laporan (SPJ) Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Partai Politik.

2.3 Pengertian dan Fungsi Partai Politik

Mendefinisikan partai politik bukanlah hal yang mudah, para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik menurut pendapat Maran (2001: 84) mendefinisikan sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan”. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Selanjutnya pengertian partai politik menurut Neuman (2005: 85) sebagai berikut:

“Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”.

Selanjutnya, pengertian partai politik menurut Neuman (2005: 85) sebagai berikut: Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain

ataudengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat. Sedangkan pengertian dari partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita kaji bahwa partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memerikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik. Menurut Friederick (2002: 57) berpendapat sebagai berikut: *A political party is a group of human beings, stabiorganized with the objective of securing or maintaning for it's leader the control of government, with the further objective of giving to member of the party through such control ideal and material benefits and adventages.* Maksudnya adalah, sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagipimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya. Sedangkan menurut Syafii (2002:59) menjelaskan pengertian partai politik sebagai berikut: Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki ideologi-ideologi yang sama, berniat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran dalam suatu level negara.

Menurut pendapat Miriam Budiarjo (1994:160) menyebutkan bahwa pengertian Partai Politik adalah: Peran sebuah partai politik biasanya dilihat dari tingkat perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Sebagai partai politik tentunya hal ini tidaklah mudah, karena para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum, partai politik didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintah. Disisi lain menurut Miriam Budiarjo (2004: 160) mendefinisikan partai politik sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama”. Maksudnya adalah, sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri. Dari definisi di atas, dapat kita kaji bahwa partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik, sosialisasi politik, serta jembatan aspirasi bagi masyarakat apabila kandidat atau calon wakil mereka duduk dalam lembaga legislatif. Sedangkan pengertian dari partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita kaji bahwa partai

politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sehubungan dengan hal ini maka fungsi peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baik-baik pendapat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Sarana sosialisasi politik dijadikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada

masyarakat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tanpa rekrutmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama pada masa mendatang.

4. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik.

Kehidupan masyarakat yang demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisamenjadi

sumber konflik, baik antara individu maupun antara kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya.

2.3.1 Bentuk Partai Politik

Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dalam berbagai cara. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari para pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di dalamnya untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan sesuatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya, pimpinan partai biasanya menjaga doktrin politik yang dianut dengan jalan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Menurut Budiarto (2004: 167) mengatakan bahwa klasifikasi yang lain dapat dilakukan dari segi sifat dan orientasi dalam hal mana partai-partai dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Partai lindungan (*patronage party*)

Partai lindungan pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekali pun organisasinya tingkat lokal sering cukup ketat) disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud

utamanya adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu hanya giat pada saat menjelang pemilu.

2. Partai ideologi atau partai azas (*programmatic party*)

Partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saringan sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat batindan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur dan disebar organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan.

Dari uraian di atas dapat kita kaji bahwa peranan partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai-partai yang ada dalam rangka mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat, disamping itu partai politik di dalam memainkan peranannya sebagai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam sebuah negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan baik.

Karena lewat partai politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian peranan sebuah partai politik dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampai aspirasi seluruh

rakyat, yang akan memberikan perubahan sosial dan politik secara besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan perbandingan agar menemukan inspirasi baru serta memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bahan kajian pada penelitian, dibawah ini ada dua penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan judul yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Azmul Fauzi pada tahun 2017 yang berjudul Peran Lembaga Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dengan hasil penelitian bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara dalam upaya pembinaan ormas terletak pada urusan administrasi seperti pendaftaran hingga penerbitan SKT. Pola Kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan ormas salah satunya jika ada isu-isu, strategis, dan isu isu aktual maka Badan Kesbangpol mengundang ormas-ormas untuk memberikan sumbangsih pemikiran seperti masukan dan kritik terkait ideologi hingga pertahanan dan keamanan negara. Upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sumatera Utara terhadap ormas yang melanggar aturan yaitu sanksi administrasi dan saksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yasni Efyanti tahun 2018 dengan judul Peran Kesbangpol Linmas dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan menggunakan metode pendekatan yuridis praktis penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan dan perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya tentang peran Kesbangpol Linmas dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Dengan hasil penelitian yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas Kota Sungai Penuh untuk menjaga kestabilan politik dibidang sosial politik adalah dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada, pembinaan tersebut dilakukan lewat pelatihan-pelatihan dibidang sosial politik. Sedangkan terhadap organisasi kekuatan sosial politik dilakukan pembinaan dibidang penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan cara melakukan pertemuan berskala dua kali setahun kepada pengurus organisasi sosial politik, membantu memecahkan persoalan yang dihadapi organisasi tersebut dalam menghadapi pemilihan umum dan membantu mengadakan fasilitas operasional.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.

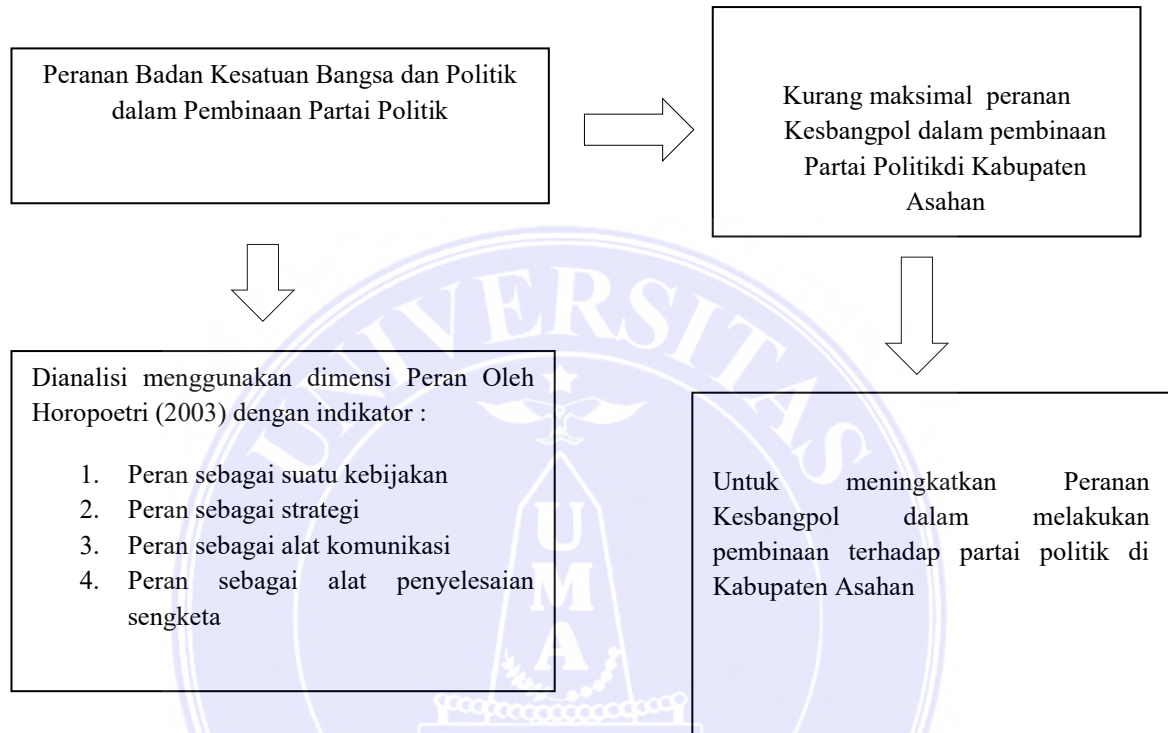
Kerangka berpikir juga bisa dibidang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pembinaan Partai Politik dengan menjabarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan dimensi Peran oleh Horopoetri (2003) dengan indikator :

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa



Adapun kerangka berpikir yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yang artinya data diperoleh bukan berupa angka-angka, melainkan hasil dari wawancara, catatan lapangan, naskah dan catatan resmi. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Haris Herdiansyah (2014:116) pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Menurut Muhammad Idrus (2009:23) Penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya (wajar). Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian ini.

Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi dan mendapatkan informasi dan data terkait peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan partai politik.

3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan Partai Politik ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Asahan, Jalan Tusam

Tabel 3.2 Jadwal dan waktu penelitian

No	Kegiatan	2022-2023				
		Jan-Aprl	Mei-Agust	Sept-Des	Jan-Mar	Apr-Sep
1	Penyusunan dan Bimbingan Proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Pengambilan Data Survei					
4	Pengumpulan data					
5	Seminar Hasil					
6	Penyelesaian dan bimbingan skripsi					
7	Pengajuan sidang meja hijau					
8	Sidang meja hijau					

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif yaitu data data yang terdiri atas kata kata, foto, sumber data tertulis yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi fokus penelitian. Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian baik melalui wawancara maupun observasi. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber dan diberikan kepada peneliti.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip yang dipublishkan maupun belum dipublishkan. Untuk itu Peneliti harus berkunjung ke perpustakaan atau ke tempat yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki seutuhnya informasi mengenai masalah yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada partai politik tetapi juga mengetahui tentang informan utama, informan kunci pada penelitian

ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Bapak H.M. Syarif, S.H

b. Informan utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan menyuluruh tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah Kasubbid Hubungan Legislatif, partai politik dan fasilitasi pemilu yaitu Bapak Darwin S.H

c. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan utama atau informan kunci, pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung ada 3 yaitu Ketua Partai PKPI yaitu Bapak Polman Simarmata dan Sekretaris PKPI yaitu Bapak Bangun M.H. Simorangkir, SP dan Bapak Antoni Siregar selaku Wakil Sekretaris I di PKPI.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data data terkait permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Namun, teknik wawancara dapat juga dilakukan dengan

memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam, yaitu wawancara yang mengandung unsur struktur dan tak terstruktur.

b. Observasi.

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Menurut Wiratna Sujarweni, (2014:142) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Pada penelitian ini peneliti terjun langsung untuk mengamati lingkungan dan aktifitas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan serta foto-foto yang terkait dengan lokasi penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini ada tiga Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Data *Display* (penyajian data).

Setelah direduksi, maka selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah.

3. Klarifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi).

Kemudian dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab semua rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan kesatuan bangsa dan politik dalam pembinaan partai politik di kabupaten asahan sudah berjalan dengan baik. Seperti yang sudah diteliti oleh peneliti menggunakan teori Horopoetri (2003) yang memiliki indikator yaitu, peran sebagai suatu kebijakan sudah berjalan dengan baik sesuai tugas Kesbangpol terhadap kebijakan terutama dalam parpol pendidikan politik seperti terhadap parpol PKPI, Peran sebagai strategi Kesbangpol sendiri sudah berjalan dengan baik dengan pendanaan pembinaan serta banyaknya muncul alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat dalam mengawasi pemerintah tidak hanya melalui parpol namun juga ormas, Peran sebagai alat komunikasi sudah dikatakan baik sesuai dengan tujuan dan informasi kepada parpol, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa cukup baik dikarenakan pihak kesbang tidak terlalu berperan penting kepada parpol, Kesbang hanya memberi saran. Dari keempat indikator tersebut dan hasil penelitian menyatakan bahwa indikator dari peran sebagai komunikasi lah yang sudah berjalan dengan baik.
2. Adapun yang menjadi penghambat peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kesbangpol khususnya pada bidang politik dalam negeri yang di mana membuat

kinerja pegawainya kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya. Dan dengan adanya penerapan yang kurang dilakukan oleh Kesbangpol pada saat memberikan pendidikan politik, Kesbangpol ini masih belum terlaksana dengan baik, karena belum adanya dirasakan Parpol sepenuhnya bahkan belum sampai kepada Parpol itu sendiri.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Partai Politik yaitu sebagai berikut:

1. Agar Kesbangpol lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada khususnya di bidang politik dalam negeri agar lebih memaksimalkan dalam menjalankan peranannya.
2. Lebih memaksimalkan penerapannya pada saat memberikan pendidikan politik sebagaimana yang sudah ada dalam Peraturan menteri Dalam Negeri
3. Diharapkan Badan kesbangpol lebih melakukan fungsi Pengawasan Terhadap partai khususnya kepada para kader partai agar bisa menjalankan fungsi partai tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggito, A. d. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Efriza dan Indrawan, Jerry. (2018). *Komunikasi Politik*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- Handoyo. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hesrdiansyah H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Lexy Moeleong, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda kaya.
- Miftah Thoha. (2012). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakart: Rajawali Pers.
- Miftah Thoha. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo, Persada.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Raga Maran. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raho. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soejono Soekanto. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Rochim. 2004, *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri

Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

Maran Raga, Fafael.(2021). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Prenhallindo

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga.

Haris Herdiansyah.(2010).*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.

Bernard, Raho.(2007).*Teori Sosiologi Modern*.Jakarta : Prestasi Pustaka

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Sumber Jurnal

Aditya Yudha, dkk. 2019. Peran Dinas Pendidikan Dalam Program penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*.

AW Jafar M. 2015. Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Jl. Raya Pandeglang Banten*.

Budiardjo M. 2021. Dasar-dasar Ilmu Politik. *Books.google.com*

Efriza NFN. 2019. Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri*.

Labolo Muhadam, Ilham Teguh. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Rajawali Pers*.

Syafii. 2018. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.*Eprints.Ipdn.ac.id*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk pembinaan yang dilakukan badan kesatuan bangsa dan politik terhadap partai politik?
2. Adakah peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pembinaan yang dilakukan badan kesatuan bangsa dan politik?
3. Dalam pembinaan, apa yang menjadi masalah atau kendala saat melakukan pembinaan tersebut?
4. Ketika ada parpol yang menyimpang atau melakukan kesalahan, apakah badan kesatuan bangsa dan politik mempunyai wewenang untuk menegur atau memberikan hukum terhadap partai politik?
5. Apakah badan kesatuan bangsa dan politik bisa disebut sebagai mitra dengan partai politik?

LAMPIRAN



1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan



2. Dokumentasi dengan Kepala Badan dan Kepala Sub Bidang Hubungan Legislatif, Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu di Badan Kesatan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan



3. Dokumentasi bersama Bapak Polman Simarmata selaku Ketua PKPI Kabupaten Asahan



4. Dokumentasi bersama bapak Bangun M.H Simorangkir, SP Sekretaris PKPI Kabupaten Asahan